

BAB V

KESIMPULAN

Kesultanan Siak Sri Indrapura, yang berdiri sejak tahun 1723 hingga 1858, memiliki identitas unik yang mencerminkan dinamika sosial, budaya, dan politik di wilayahnya selama masa kemerdekaan. Kesultanan ini didirikan oleh Raja Kecil, seorang tokoh yang berasal dari Minangkabau dan memiliki pengaruh besar dalam pembentukan tatanan politik serta kebudayaan di Siak.

Pemerintahan Kesultanan Siak secara umum menunjukkan dua corak utama yang mencerminkan latar belakang para sultan yang memerintah. Pertama, corak pemerintahan Melayu terlihat pada masa kekuasaan Sultan Mahmud Syah, Sultan Ismail, dan Sultan Yahya. Pada periode ini, nilai-nilai dan tradisi Melayu sangat menonjol dalam tata kelola pemerintahan, simbolisme adat, serta hubungan masyarakat. Kedua, corak perantauan Minangkabau atau Kacu terlihat selama pemerintahan Sultan Alamuddin dan Sultan Muhammad Ali. Pengaruh budaya dan jaringan perantauan Minangkabau membawa dinamika baru dalam sistem politik serta interaksi ekonomi di wilayah Kesultanan Siak.

Dinasti Syahabuddin yang memerintah di kemudian hari tetap mempertahankan sistem pemerintahan yang sudah ada, sekaligus menjaga kesinambungan dengan tradisi politik dan budaya yang diwariskan para pendahulunya. Hal ini menunjukkan upaya konsisten untuk menjaga stabilitas politik serta identitas budaya Kesultanan Siak di tengah berbagai tantangan.

Dari sisi sosial, masyarakat Siak terbagi ke dalam beberapa kelompok utama. Selain masyarakat lokal Siak, terdapat pula komunitas perantauan Minangkabau dan Johor yang memiliki peran penting dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Di samping itu, terdapat kelompok Timur Asing serta komunitas lain yang turut mewarnai keberagaman masyarakat di wilayah ini.

Secara simbolis, Kesultanan Siak cenderung kuat mempertahankan nilai-nilai adat Melayu. Symbolisme adat Melayu ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam upacara kenegaraan, tradisi hukum, serta praktik sosial masyarakat. Identitas Melayu yang kuat ini menjadi salah satu elemen penting yang menjaga persatuan dan kesinambungan Kesultanan Siak selama masa pemerintahannya.

Ketika Kesultanan Siak berada di bawah pengaruh Belanda, terjadi perubahan signifikan dalam corak pemerintahan dan simbolisme budaya. Sistem pemerintahan yang sebelumnya berkembang mulai menerima intervensi dari Belanda, meskipun Kesultanan tetap berupaya mempertahankan beberapa elemen otonomi. Sempitnya ruang kekuasaan membuat para sultan mencari cara untuk tetap menunjukkan eksistensinya.

Salah satu contoh terbaik adalah Sultan Syarif Hasyim, yang melakukan modernisasi kerajaan dengan terinspirasi dari kondisi negeri-negeri Melayu seperti Johor serta pengalamannya selama berada di Belanda. Dalam upaya memperkuat legitimasi dan status kerajaan, Syarif Hasyim mengembangkan simbolisme yang merupakan campuran antara tradisi Eropa dan Melayu. Hal ini menjadikannya

tampil sebagai sosok raja modern yang seolah-olah setara dengan pemerintah kolonial Belanda. Salah satu pencapaian pentingnya adalah pembangunan Bab al-Qawaid, sebuah dokumen yang menunjukkan bahwa Siak memiliki konstitusi sendiri.

Di sisi lain, Sultan Syarif Kasim II lebih fokus pada pengembangan pendidikan dan tidak menunjukkan sikap pro-Belanda yang kuat. Beliau cermat dalam membaca setiap situasi politik yang dihadapinya, dengan tetap menjaga keseimbangan antara menjaga hubungan dengan Belanda dan memperjuangkan kepentingan masyarakat Siak. Termasuk di antara kecermatannya adalah mengambil sikap kooperatif ketika Jepang menduduki wilayahnya serta mendukung Republik Indonesia saat Revolusi Kemerdekaan.

Sultan Syarif Kasim II sempat berupaya mengembalikan kekuasaannya melalui gagasan Swapraja Siak, yang diperjuangkannya sejak pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS). Meskipun telah berhasil mengumpulkan banyak tanda tangan dukungan, respons pemerintah pusat dan daerah tetap acuh tak acuh. Akibatnya, gerakan Swapraja Siak meredup, serupa dengan nasib swapraja-swapraja lainnya di Indonesia belasan tahun kemudian. Meskipun upaya tersebut gagal, identitas Siak sebagai wilayah dan kesultanan tidak pudar. Hal ini terlihat dari banyaknya kajian akademik mengenai Siak serta perkembangan signifikan ketika Kabupaten Siak terbentuk pada tahun 1998. Identitas sejarah Kesultanan Siak dimanfaatkan sebagai potensi untuk pengembangan pariwisata yang kaya akan nilai budaya dan sejarah.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa identitas Kesultanan Siak Sri Indrapura mengalami perubahan, baik dari segi bentuk maupun maknanya. Dari bentuk, Kesultanan Siak pada awalnya merupakan sebuah entitas monarki campuran Minang-Melayu di pesisir timur Sumatera, kemudian identitas kesultanan di masa kekuasaan Belanda telah dialihkan kepada simbolisme-simbolisme tertentu, karena kekuasaan sultan semakin terbatas. Ketika Kesultanan Siak tidak ada lagi, sisa-sisa peninggalannya menjadi modal bagi penyusunan identitas Kesultanan Siak, dengan interpretasi sesuai zaman penyusunannya. Pada awalnya, identitas Kesultanan Siak digunakan sebagai penunjang nasionalisme Indonesia di daerah Riau, kemudian berkembang lagi menjadi modal pariwisata sejarah dan budaya Kabupaten Siak.

Fenomena baru kemudian muncul dalam bentuk klaim-klaim terkait Kesultanan Siak. Hal ini dimulai begitu Kabupaten Siak mengembangkan pariwisata sejarah dan budaya, sekaligus membentuk citra Siak menggunakan peninggalan Kesultanan Siak Sri Indrapura. Meskipun Lembaga Kekerabatan Resam Kesultanan Siak Sri Indrapura dibentuk secara tidak resmi pada tahun 2003, lembaga ini tidak pernah mengklaim kesultanan dan berusaha membuat kesan legitimasi peninggalan kesultanan untuk pemerintah daerah Kabupaten Siak. Sementara itu, beberapa orang yang mengaku keturunan sultan Siak mulai mengklaim dan membicarakan peninggalan kesultanan. Awalnya, klaim tersebut hanya berkaitan dengan pewarisan harta kesultanan. Namun, seiring waktu, klaim ini berkembang menjadi perebutan gelar sultan. Faktor-faktor seperti garis suksesi yang tidak jelas, ketidaksetujuan di antara keturunan yang bercabang, serta motivasi

tertentu menyebabkan upaya pendirian kembali Kesultanan Siak menimbulkan kontroversi.

Klaim pewaris dan perebutan gelar tersebut menunjukkan adanya dinamika yang kompleks di sekitar identitas Kesultanan Siak pada masa modern. Beberapa pihak melihat upaya ini sebagai bentuk pelestarian sejarah dan budaya, sementara pihak lain memandangnya sebagai ambisi politik atau upaya pribadi yang kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Klaim tentang sultan Siak ke-13 sampai tesis ini ditulis masih merupakan perkara kontroversial dan belum selesai. Terlepas dari berbagai kontroversi yang muncul, fenomena tersebut mencerminkan betapa kuatnya nilai simbolis dan sejarah Kesultanan Siak dalam kehidupan masyarakat.

Meskipun demikian, fenomena sultan Siak baru ini harus dianggap sebagai efek samping alih-alih sebuah konsekuensi dari otonomi daerah pasca Reformasi. Hal ini disebabkan para aktor, yang belum pernah atau jarang terdengar oleh publik, baru muncul ke permukaan takkala Kabupaten Siak telah memapankan dan melestarikan identitas Kesultanan Siak yang telah diarahkan kepada aspek budaya Melayu kabupaten tersebut.